

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan analisis jabatan Pegawai Negeri Sipil ini telah sesuai dengan peraturan Gubernur Lampung nomor 52 tahun 2009 tentang pedoman dan petunjuk teknis analisis jabatan dan telah melalui tahapan-tahapan yang mengacu kepada peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2009 tentang pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan kesimpulan tersebut peneliti tidak hanya dengan memperhatikan informasi yang didapat dari informan tapi juga saat observasi dan dokumentasi yang peneliti dapatkan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diajukan berkaitan dengan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut;

1. Analisis jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung harus tetap menggunakan pedoman dan prosedur yang berlaku untuk mendapatkan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan kerja, tidak berlebihan dan tepat pada tupoksi dan sesesuaian dengan disiplin ilmu pegawai.

2. Perlu adanya perhatian lebih lanjut mengenai latar belakang pendidikan pegawai dan bentuk keprofesionalan pegawai. Mengingat hasil dari analisis jabatan ini banyak fungsinya, seperti dalam proses mutasi pegawai, diklat, pelatihan dan lain sebagainya sehingga diharapkan proses analisis jabatan benar-benar detail sehingga fungsinya tidak hanya untuk mengetahui berapa jumlah yang dibutuhkan saja. Karena dalam proses mutasi pegawai seharusnya dapat mengimplemantasikan analisis jabatan apabila dengan sebenarnya seandainya mendapat tugas sebagai analisis jabatan atau sebagai pemimpin suatu organisasi atau lembaga. Apabila analisis jabatan telah dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang ada maka penulis yakin bahwa dengan proses demikian akan didapatkan sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga perlahan-lahan proses reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik.

Mengingat masyarakat pengguna pelayanan banyak mengeluhkan akan lambannya penanganan pemerintah atas masalah yang dihadapi dan bahkan mereka telah memberikan semacam publik alarm agar pemerintah sebagai instansi yang paling berwenang, responsif terhadap semakin menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mengambil inisiatif, birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya antara lain:

1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan;

2. birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat);
3. birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni : pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya dan ketepatan waktu;
4. birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu pembangunan;
5. birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri.